



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

RAPAT KERJA KOMISI IX DPR RI

Tahun Sidang	: 2016-2017
Masa Persidangan	: III
Rapat ke	: 19 (Sembilan Belas)
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Dengan	: Menteri Ketenagakerjaan RI
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/tanggal	: Senin, 6 Februari 2017
Pukul	: 14.00 WIB – selesai
Acara	: <ol style="list-style-type: none">1. Laporan Menteri Ketenagakerjaan RI terkait Perkembangan dan Kondisi Penanganan Tenaga Kerja Asing hasil rekomendasi Panja Pengawasan Tenaga Kerja Asing Komisi IX DPR RI.2. Penjelasan Menteri Ketenagakerjaan RI terkait upaya perlindungan Anak Buah Kapal Indonesia khususnya di Taiwan Pasca Ratifikasi <i>MLC</i>.3. Penjelasan Menteri Ketenagakerjaan RI terkait tindak lanjut terhadap hasil Rekomendasi Panja Pengupahan Komisi IX DPR RI.
Ketua Rapat	: Dede Yusuf. M.E, S.T, M.I.Pol/Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris Rapat	: Minarni, S.H./ Kepala Bagian Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IX DPR RI Gedung Nusantara I Lt.1 Jl.Jend. Gatot Subroto, Jakarta
Hadir	: <ol style="list-style-type: none">A. 25 orang dari 50 orang Anggota Komisi IX DPR RI, 1 orang Anggota Izin;B. Menteri Ketenagakerjaan RI beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Ketenagakerjaan dibuka pukul 14.25 WIB, setelah kuorum terpenuhi sebagaimana Peraturan Tata Tertib Pasal 251 ayat (1), rapat dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN

1. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk meningkatkan kinerja dalam hal:
 - a. pencegahan dan pengawasan orang asing dari wisatawan mancanegara yang menjadi TKA,
 - b. koordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dalam meningkatkan pajak bagi TKA pada jabatan tertentu,
 - c. memprioritaskan TKA yang bertujuan memenuhi transfer pengetahuan,
 - d. mengkoordinasikan realisasi program 10 juta lapangan pekerjaan dengan instansi terkait.
2. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan RI agar berkoordinasi dan diikutsertakan dalam seluruh kesepakatan yang dilakukan oleh Kementerian BUMN, Kementerian Perindustrian RI dan BKPM RI terkait investasi dan proyek infrastruktur yang menyertakan pekerja asing dimana sedapat mungkin investasi asing diprioritaskan untuk tenaga kerja lokal.
3. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan RI meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri RI, Dirjen Imigrasi Kemenkumham RI dan BNP2TKI untuk segera memberikan penyelesaian dokumen legal kepada TKI non prosedural di luar negeri sehingga kejadian musibah tenggelamnya kapal pengangkut TKI tidak terjadi lagi.
4. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk segera membuat regulasi yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengesahan Maritime Labour Convention, 2006/Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, 2006 dan peraturan perundang-undangan lainnya terkait perlindungan TKI ABK Nelayan dan pekerja pelaut dibidang perikanan dari perbudakan dan pelanggaran hak asasi manusia.
5. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan untuk melaksanakan rekomendasi Panja Pengawasan TKA dan Panja Pengupahan Komisi IX DPR RI guna menyelesaikan permasalahan Pengawasan TKA dan permasalahan pengupahan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
6. Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk memanfaatkan peran BLK di daerah dalam rangka meningkatkan kualitas TKI melalui peningkatan anggaran.
7. Komisi IX DPR RI meminta kembali Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk melakukan kerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dan Kementerian Dalam Negeri RI dalam rangka peningkatan mutu BLK sehingga menjadi program unggulan yang dapat menciptakan pekerja yang profesional.

8. Komisi IX DPR RI akan mengagendakan Rapat Kerja Gabungan dengan Kementerian Ketenagakerjaan RI dan Kementerian Negara BUMN RI terkait persoalan ketenagakerjaan termasuk rencana penutupan beberapa pabrik gula di Jawa Timur.
9. Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk segera menyelesaikan permasalahan diantara Kementerian/Lembaga, terkait ketentuan yang diatur pada RUU tentang PPILN, sebelum pembahasan lanjutan di Komisi IX DPR RI.
10. Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk memberikan jawaban tertulis atas pertanyaan anggota dalam Rapat Kerja hari ini, disampaikan paling lambat Senin, 13 Februari 2017.

Rapat diakhiri pukul 20.20 WIB

**Ketua Rapat/
Ketua Komisi IX DPR RI,**



DEDE YUSUF. M.E, S.T, M.I.Pol
A-415